



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. WAHYUDI
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 670823

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.051.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m²/45 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m²/300 m² di KAB / KOTA KOTA MALANG , WARISAN Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 2.371 m²/2.371 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 151.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 38.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, YAMAHA N-MAX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 1.094.000.000

III. HUTANG Rp. 22.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.071.800.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **UMAR KHAYYAN**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **670810**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **747.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m²/113 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 215 m²/156 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 322.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **11.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.444.916**

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. **763.944.916**

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **763.944.916**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : BERTHOLOMEUS GEORGE DA SILVA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670824

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.025.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 81 m²/81 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 10 m²/7 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 106.000.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KARIMUN Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 25.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.156.000.000

III. HUTANG Rp. 45.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.111.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL ALLAM AMRULLAH**
2. Jabatan : **ANGGOTA**
3. NHK : **661767**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **575.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/45 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **14.000.000**

1. MOTOR, HONDA D1B02N12L2L2 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
2. MOTOR, HONDA B5D02K2M2 MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **3.300.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **5.545.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **---**

Sub Total Rp. **597.845.000**

III. HUTANG Rp. **162.000.000**

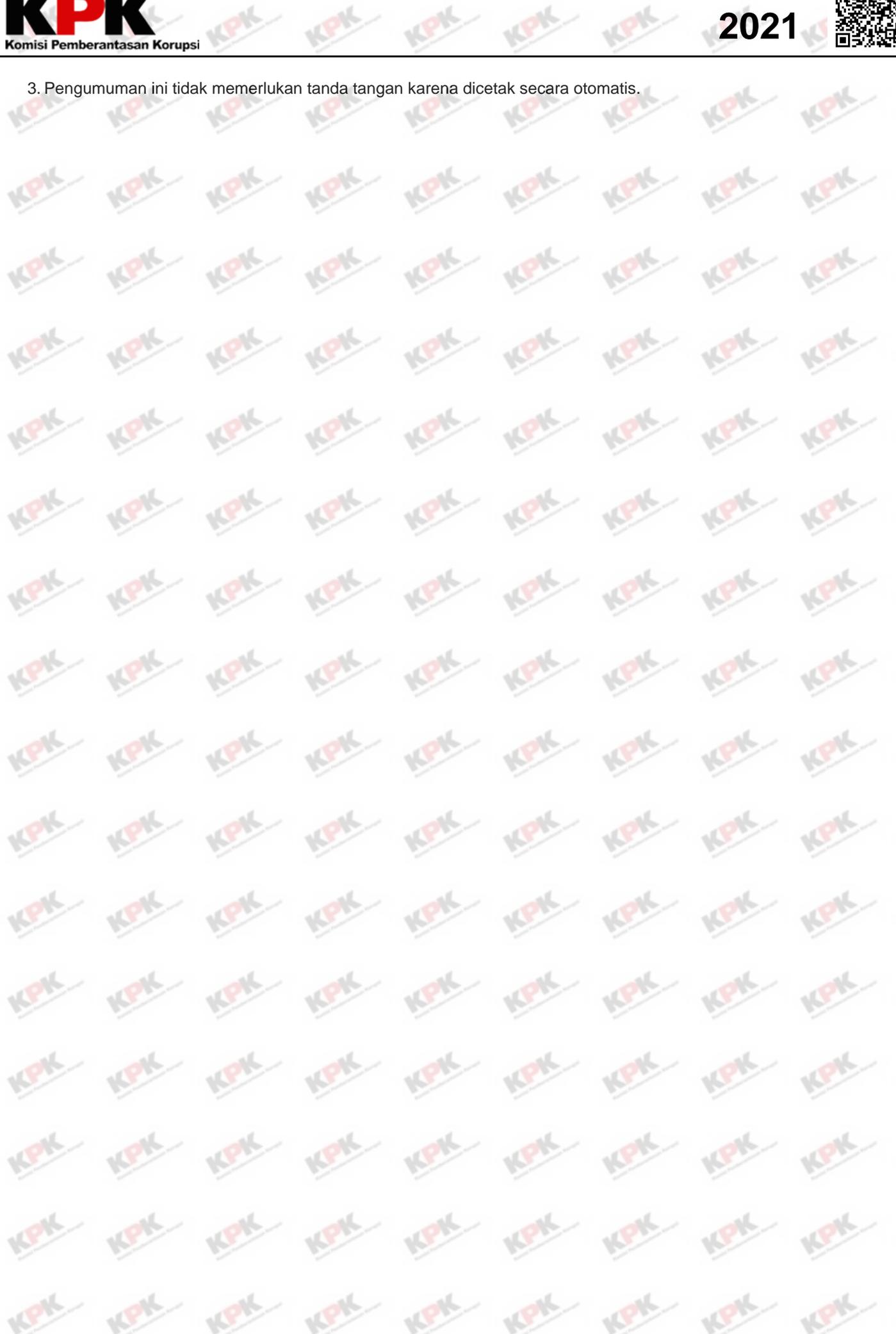
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **435.845.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
UNIT KERJA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD HAZAIRIN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670819

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	21.000.000
1. MOTOR, HONDA HONDA VARIO 150 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	13.842.222
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	34.842.222
III. HUTANG	Rp.	89.414.400
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-54.572.178

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.